



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang diberikan kepada kita, juga atas perkenan-Nya, Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 dapat terwujud. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis pagu indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Demikian dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 ini disusun berdasarkan Tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis, semoga rencana kerja ini dapat direalisasikan dalam upaya pelaksanaan urusan Pengawasan secara maksimal.

Bengkalis, Juni 2025

INSPEKTUR DAERAH,



H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19710522 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	29
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	29
3.3 Program dan Kegiatan	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
BAB V PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Renja Kementerian/Lembaga terkait, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai kewajiban menyusun dokumen Renja Perangkat Daerah. Dokumen Renja tersebut merupakan bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis. Renja Perangkat Daerah ini juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis di tahun mendatang.

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah akan diverifikasi kesesuaiannya terhadap RKPD Kabupaten Bengkalis. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Bengkalis, maka Renja Perangkat Daerah

tersebut mendapat pengesahan oleh Bupati Bengkalis dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis oleh Inspektur Daerah Kabupaten Bengkalis.

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 2). Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- 3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 7). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 9). Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 05);
- 10). Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
- 11). Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 – 2026 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 69);
- 12). Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah tahun 2021 nomor 108) ;
- 13). Surat Bupati Bengkalis Nomor : 000.7.2.4/BAPPEDA-PPEPD/851/2025 tanggal 03 Oktober 2025 tentang Permintaan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan Renja

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis disusun dengan maksud sebagai berikut :

- 1) Sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.
- 2) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja program Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 2) Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 3) Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- 5) Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Tahun 2026 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 129.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2025 dan capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2021 – 2026.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu. Berisikan tentang kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu beserta hal kritis yang terkait Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD. Berisikan telaah Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bengkulu Tahun 2025 dan kebutuhan anggaran program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2025.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional berisikan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu;

- 3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan digambarkan dengan tabel.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2024 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pada pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun lalu, dan realisasi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis dan/atau realisasi APBD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam evaluasi adalah:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra ; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut :

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
1. Pendampingan dan Asistensi

Kajian (reviue) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD Tahun 2024 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan sesuai dengan rencana. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Reviue hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024, dan realisasi Renstra Perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah telah berjalan sesuai yang direncanakan. Dari 3 (tiga) program yang meliputi 11 kegiatan, 38 Sub Kegiatan secara umum capaian kegiatan secara fisik tercapai 90,84%.

Pada Tahun 2024 anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis sebesar **Rp.19.172.046.088,-** meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 9.749.319.119,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.9.422.726.969,-. Pada Triwulan ke IV tahun 2024 terjadi perubahan anggaran Inspektorat Daerah kabupaten Bengkalis sebesar **Rp.17.871.941.001,-** mengakibatkan terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.1.300.105.087,- yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp.9.744.300.725,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.8.127.640.276,- Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Realisasi keuangan sebesar 74,42%. Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 74,42%. dari target 100%. Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar 59,17 % dari target 100%, Capaian Indikator Kinerja Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi sebesar 74,42% dari target 100 %. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana Kerja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024 disajikan pada Tabel T-C.29. berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Bengkulu

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULUS
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2024
INSPEKTORAT
TRIMULAN 4

[illegible]

Hal 7 dari 7

No	Sebaran RPD	KODE	Uraian Ruang Dukun Pemerintahan Daerah dan Program/ Anggaran	Institusi Karya Program/ Gubernur/ Anggaran Daerah	Target RENCANA Pembangunan Pada Tahun 2024 (atau periode RENCANA)	Realisasi Capaian Karya RENCANA Karya Daerah Karya Perang Tahun 2023 (atau 2022)	Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 yang tersebut)	Realisasi Kinerja Pada Tahun Berjalan	Realisasi Capaian Karya dan Anggaran RPD yang direvisi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENCANA Tahun 2024 (atau 2023) Pembangunan RPD Tahun 2023	Target Kualitas Karya dan Realisasi Anggaran RENCANA Tahun 2024	Perkiraan Kualitas Karya dan Anggaran RPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

* Data dari Realisasi Anggaran

Ditandatangani,
Bergabung, 1 Januari 2023
Inspektur Keuangan Bergabung

[Signature]
RIZKI ZAHRA, S.Pd, M.Pd
Pemeriksa Utama Mutu
NIP. 9716221990111001

Ditandatangani,
Bergabung, 1 Januari 2023
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah



BINTO, BE, M.Si
Pemeriksa T. 1
NIP. 19970012000011002

FILE IS LOCKED - FOR AUDIT PURPOSES

Dari program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang dijalankan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis sampai akhir Desember 2024, semua program/kegiatan yang dilaksanakan sudah memenuhi target. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua program/kegiatan sudah dapat berjalan dengan baik namun terdapat beberapa kegiatan tertunda pelaksanaan karena keuangan tidak terealisasi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tidak terlepas dari faktor pendorong pada sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem Monev dan SIPD dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu Inspektirat Daerah Kabupaten Bengkalis membutuhkan sumber daya aparatur yang baik baik dari segi kuantitas maupun kualitas di bidang pengawasan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dari hasil analisis kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut : Pencapaian sasaran strategis dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja sasaran. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis, pada Tahun 2024 Inspektorat Daerah kabupaten Bengkalis melakukan perbaikan Sasaran Kinerja, berdasarkan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

a. Indikator ke 1

Level Kapabilitas APIP. dengan target Level 3 dan realisasi Level 3, capaian kinerja sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini sangat baik dan tercapai. Capaian Kinerja ini berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3 Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.09.03/LHP-242/PW04/6/2024 tanggal 26 Juli 2024 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 disimpulkan bahwa Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis berada pada "Level 3" dengan skor "3,170"

Level Kapabilitas APIP adalah metode penilaian terhadap kemampuan/kapasitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diukur berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun.

Permasalahan/Faktor Penghambat :

Secara umum tidak terdapat permasalahan pada pencapaian indikator Level Kapabilitas APIP.

Solusi/Strategis pemecahan masalah :

Penguatan Pengendalian Internal pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian tingkat Kapabilitas APIP yang selaras dengan pelaksanaan pengawasan.

b. Indikator Ke 2

Predikat Akuntabilitas Kinerja APIP dengan target Predikat BB dan realisasi BB dengan capaian kinerja sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini sudah sangat baik dan tercapai. Capaian kinerja ini berdasarkan Laporan hasil evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor : 700.1.2.1/108/ ITDA tanggal 30 April 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Dari realisasi kinerja tersebut menunjukkan capaian kinerja Predikat Akuntabilitas Kinerja APIP sebesar 100%.

Permasalahan :

Secara umum tidak terdapat permasalahan pada capaian kinerja Akuntabilitas Kinerja APIP namun perlu penguatan pada komponen pengukuran kinerja dan evaluasi internal.

Solusi

Implementasi pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi dan melakukan evaluasi internal secara berkala

c. Indikator ke 3

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP semester II Tahun 2024, bahwa Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Tahun 2024 dengan target 85% realisasi 61% sehingga capaian sebesar 71,76%.Capaian kinerja ini berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut pengawasan APIP semester II Tahun 2024, menunjukkan capaian kinerja 71,76% belum memenuhi target yang ditetapkan.

Permasalahan :

Secara umum tidak terdapat permasalahan pada pencapaian Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP namun harus meningkatkan pemantauan terhadap hasil pengawasan APIP terhadap temuan sehingga persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP meningkat.

Solusi

Meningkatkan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) secara berkala dan melakukan pendampingan kepada auditi dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan APIP.

d. Indikator ke 4

Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK untuk indikator ini dengan target 70% realisasi 67% dengan capaian kinerja 95%. Capaian kinerja ini berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Tahun 2024. capaian kinerja 95%.

Permasalahan :

Secara umum tidak terdapat permasalahan pada pencapaian Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK namun harus melakukan Koordinasi dan konsultasi dengan BPK RI dalam proses penyelesaian rekomendasi BPK termasuk pemenuhan eviden tindak lanjut.

Solusi

Mendorong unit kerja untuk melakukan penyelesaian temuan BPK dalam waktu 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK diterbitkan sehingga temuan pemeriksaan BPK dengan cepat ditindak lanjut.

e. Indikator ke 5

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Pengelolaan pengaduan Masyarakat untuk indikator ini dengan terget 100% realisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%, pencapaian kinerja ini sudah sangat baik. merupakan angka yang realistis dan optimis telah tercapai.

Permasalahan :

Secara umum tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Pengelolaan pengaduan Masyarakat namun untuk perbaikan penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat pada tahun tahun anggaran 2024 telah dibangun aplikasi WBS dan pengelolaan pengaduan masyarakat internal inspektorat Daerah.

Solusi

Pembangunan Aplikasi WBS dan Pembangunan dan Penetapan Kebijakan Kepala Daerah tentang implementasi WBS.

f. Indikator ke 6

Persentase Capaian MCP Korsupgah Korupsi dengan terget 85% realisasi 72% dengan capaian kinerja 85% pencapaian kinerja ini sudah cukup baik. Meskipun belum mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Permasalahan :

Secara umum tidak terdapat permasalahan pencapaian MCP Korsupgah Korupsi namun dari 9 (sembilan) area Intervensi MCP masih terdapat area yang masih rendah yaitu pada area Intervensi Penganggaran dan Pengelolaan Barang dan Jasa.

Solusi

Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025 yang menitik beratkan dukungan pengawasan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja MCP Korsupgah Korupsi.

g. Indikator ke 7

Level Maturitas Manajemen Risiko untuk indikator ini dengan target Level 3 realisasi Level 3 dan capaian kinerja 100%, angka ini sudah cukup baik dan sudah mencapai target yang diharapkan. Capaian kinerja ini Berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE-09.03/LHP-266/PW04/3/2024 tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun menunjukkan Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada level 3.

Permasalahan :

Secara umum masih terdapat permasalahan pada implementasi manajemen risiko belum sepenuhnya mengacu pada peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis .

Solusi

Meningkatkan fasilitasi implementasi manajemen risiko sesuai peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Tabel T-C.30.

Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi/Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn-2)	Tahun 2024 (thn-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Level Kapabilitas APIP			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3		
2.	Predikat Akuntabilitas Kinerja APIP			BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB		
3.	Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP			75	85	90	95	83,54	85	90	95		
4.	Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK			65	70	75	80	68	70	75	80		
5.	Persentase Tindak Lanjut atas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat			85	85	90	95	100	85	90	95		
6.	Persentase Capaian MCP Korupsi			85	85	85	90	83	85	85	90		
7.	Level Maturlas Manajemen Risiko			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3		

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat, maka selanjutnya akan dikemukakan metode yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut. Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis ini yaitu :

TABEL. 3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

NO	ASPEK PERMASALAHAN PELAYANAN PD	PERMASALAHAN STRATEGIS	TELAAHAN RENSTRA	TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KD DAN WAKILKD TERPILIH	ISU-ISU STRATEGIS
1	Rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Rendahnya Kualitas Pengawasan Sistem Integritas Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Pengawasan dalam Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis,Maju dan Sejahtera	Mewujudkan Pemerintah yang Berkarakter dan Berintegritas
		Rendahnya Kualitas Hasil Pengawasan		Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter	
		Rendahnya Kapabilitas APiP level		Program :	
				1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	
			2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		
				3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai institusi pengawasan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam rangka implelementasi tugas tersebut di atas Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pengawasan tujuan tertentu, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan administrasi serta pelaksanaan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Penelaahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis yang tercantum pada RKPD tahun 2026 program, kegiatan dan sub kegiatan rencana kerja Inspektorat Daerah berdasarkan Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari 3 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan, Dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
2. Membuat perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan tersebut dengan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya. Rumusan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2026 selaras dengan Renja Tahun 2026 berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 yang telah dilakukan pemetaan berpedoman pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
3. Memastikan bahwa program dan kegiatan di Inspektorat Daerah yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD Tahun 2026 program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Tahun 2026 pada lampiran tabel 3.1 merupakan lanjutan dari Renja Tahun 2024;

5. Mengidentifikasi kesesuaian jenis program dan kegiatan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan jenis program, kegiatan dan sub kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja berdasarkan dari Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 yang telah dilakukan pemetaan berpedoman pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
6. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil revidi terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan/sub kegiatan. Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun pada tabel 3.1 telah sesuai hasil pemetaan Renstra dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dengan pagu indikatif disusun berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah yang berpedoman pagu program pada Renstra Inspektorat Daerah dan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut ini :

Tabel T-C.31.

Review terhadap RKPD tahun 2026 Kabupaten Bengkulu

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting	
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bengkulu	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Inspektorat	Level 3	15.501.378.423	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bengkulu	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Inspektorat	Leve 3	12.742.768.179	
1	Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Pengawasan	100%	460.580.876	Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Pengawasan	100%	31.800.000	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	220.327.936	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	16.800.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	130.252.940	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	110.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase Pemenuhan Penyediaan Laporan Keuangan/Realisasi Keuangan	100%	10.517.584.876	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase Pemenuhan Penyediaan Laporan Keuangan/Realisasi Keuangan	100 %	9.910.660.099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang	10.407.584.876	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang	9.910.660.099	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	110.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase Pemenuhan Pengadministrasian Barang Milik Daerah	100%	134.400.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase Pemenuhan Pengadministrasian Barang Milik Daerah	100 %	134.400.000	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	134.400.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	134.400.000	
D	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase Capaian Pemenuhan Kompetensi Aparatur Pengawasan	100%	1.080.679.071	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase Capaian Pemenuhan Kompetensi Aparatur Pengawasan	100 %	110.000.000	
1	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50 Paket		Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50 Paket		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	750.600.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	100.000.000	
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	150 Orang	171.079.071	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	150 Orang	10.000.000	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	159.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang		
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Penunjang Kegiatan Pengawasan	100%	1.627.979.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Penunjang Kegiatan Pengawasan	100 %	1.250.600.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	65.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	40.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	186.600.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	170.000.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1100 Paket	234.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1100 Paket	230.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	187.379.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	120.000.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20 Dokumen	55.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20 Dokumen	10.000.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	650.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	630.000.000	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	250.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.600.000	
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase Pemenuhan Barang Penunjang Kegiatan Pengawasan	100%	250.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase Pemenuhan Barang Penunjang Kegiatan Pengawasan	100 %	25.000.000	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		
2	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		
3	Pengadaan Mebel	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		Pengadaan Mebel	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	10.000.000	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	250.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pengawasan	100%	447.700.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pengawasan	100%	329.318.080	
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	140.500.000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	99.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	260.700.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	190.000.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	46.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	40.138.080	
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan Pengawasan	100%	982.454.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan Pengawasan	100%	340.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	285.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	340.000.000	
2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	520.112.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	546.000.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	176.642.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	65.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kabupaten Bengkalis	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	100%	2.837.658.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kabupaten Bengkalis	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	100%	1.281.250.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Bengkalis	Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK	80%	2.261.958.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Bengkalis	Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK	80%	1.061.250.000	
		Kabupaten Bengkalis	Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	95%			Kabupaten Bengkalis	Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	95%		
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	25 Laporan	650.700.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	25 Laporan	311.250.000	
2	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	50 Laporan	452.596.000	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	50 Laporan	180.000.000	
3	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	85.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	20.000.000	
4	Pengawasan Desa	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	11 Laporan	300.656.000	Pengawasan Desa	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	11 Laporan	200.000.000	
5	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5 Kesepakatan	319.678.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5 Kesepakatan	150.000.000	
6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	453.328.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	200.000.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Bengkalis	Persentase Tindak Lanjut Pengawasan Masyarakat	100%	575.700.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Bengkalis	Persentase Tindak Lanjut Pengawasan Masyarakat	100%	220.000.000	
7	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	150.700.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan		
8	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	425.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	220.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
J	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Tindak Lanjut Hasil Asistensi	100%	1.626.072.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Tindak Lanjut Hasil Asistensi	100%	454.190.975	
	Pendampingan dan Asistensi		Level Maturitas Manajemen Risiko	Level 3	1.626.072.000	Pendampingan dan Asistensi		Level Maturitas Manajemen Risiko	Level 3	454.190.975	
			Persentase Capaian MCP Korpsugah Korupsi	90%				Persentase Capaian MCP Korpsugah Korupsi	90%		
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Perangkat Daerah yang Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	46 Perangkat Daerah	820.600.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Perangkat Daerah yang Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	46 Perangkat Daerah	259.190.975	
2	Pendampingan, Asistensi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Perangkat Daerah yang Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	210.400.000	Pendampingan, Asistensi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Perangkat Daerah yang Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	25.000.000	
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	500.072.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	130.000.000	
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Perangkat Daerah yang Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	46 Perangkat Daerah	95.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Perangkat Daerah yang Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	46 Perangkat Daerah	40.000.000	
					19.965.108.423					14.478.209.154	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis. Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis dan integrasi dengan capaian Renstra K/L dan Renstra Provinsi Riau dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis agar kesesuaian capaian tersebut dapat memberikan kontribusi secara berjenjang dari Kabupaten Bengkalis ke Provinsi Riau dan selanjutnya secara vertikal di Nasional bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Provinsi dan Kementerian terkait memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan bidang pengawasan baik tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Untuk itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis harus merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun berikutnya berdasarkan telaahan terhadap prioritas nasional dalam rancangan awal RKP Tahun 2024.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam menyusun perencanaan harus mengacu Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 yang telah tertuang sebagaimana terdapat dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dengan visi yaitu **“ Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera “**

Berdasarkan visi tersebut dapat dirumus dengan 3 (tiga) misi yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif Dalam Memajukan Perekonomian;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter;
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis, yaitu **“MISI II “Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta**

Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter”.

Sesuai dengan misi tersebut maka tujuan yang akan dicapai sebagai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam RPJMD periode 2021 – 2026 sebagai perangkat daerah yang melaksanakan bidang pengawasan adalah **“Mewujudkan Pemerintahan yang Berkarakter dan Berintegritas”** dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Terhadap Kepatuhan dan Efektifitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Menurunnya Tingkat Penyalahgunaan Wewenang pada Pemerintah Daerah
2. Optimalisasi Pengawasan Sistem Integritas Kinerja Pemerintah Daerah.
3. Meningkatnya Kompetensi dan Kelembagaan APIP

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis dan kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026). Dalam Renstra Inspektorat 2021-2026 memuat tujuan, sasaran yang terkait langsung tugas pokok, fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis yang mengacu kepada Misi kedua RPJMD Kabupaten Bengkalis yaitu **“ Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter”**.

Program dan Kegiatan pada tahun 2023 disusun guna penyesuaian Program dan Kegiatan dalam Renstra PD untuk periode tahun 2021-2026 dan dijadikan bahan awal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023. Hal ini memperlihatkan adanya sinergitas Program dan Kegiatan dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sehingga penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan secara menyeluruh.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis disusun berdasarkan amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dipublikasi kan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemuthakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Secara garis besar Program dan kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6	01				INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah daerah
6	01	02	2.01	03	Review Laporan Kinerja
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGAWASAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
6	01	03	2.02	03	Koordinasi , Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 diperlukan rumusan program/kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

- 1) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang pengawasan;
- 2) Keserasian dan keterpaduan pembangunan bidang pengawasan dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026 dan hasil review Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026;
- 3) Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Program/kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas di bidang pengawasan.
- 2) Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebanyak 3 Program di Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 3) Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026 sebanyak 11 kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 secara total sebesar **Rp.19.965.108.423,-** yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkalis Program dan kegiatan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan.

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027

OPD : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Inspektorat		100 %	12.742.768.179			100 %	12.762.768.179	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan	Kabupaten Bengkalis	100 %	31.800.000				16.800.000	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkalis	4 Dokumen	16.800.000	APBD		4 Dokumen	16.800.000	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bengkalis	4 Laporan	15.000.000	APBD		4 Laporan	0	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkalis	2 Laporan		APBD		2 Laporan		
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Laporan Keuangan/Realisasi Keuangan		100%	9.910.660.099			100%	9.910.660.099	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bengkalis	44 Orang	9.910.660.099	APBD		50 Orang	9.910.660.099	
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	0	APBD		1 Laporan	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadministrasian Barang Milik Daerah		100 %	134.400.000			100 %	134.400.000
6.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bengkulu	5 Dokumen	134.400.000	APBD		5 Dokumen	134.400.000
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pemenuhan Kompetensi Aparatur Pengawasan		100 %	110.000.000			100 %	100.000.000
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Bengkulu	50 Paket		APBD		50 Paket	0
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Bengkulu	45 Orang	100.000.000	APBD		50 Orang	100.000.000
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bengkulu	150 Orang	10.000.000	APBD		150 Orang	0
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bengkulu	20 Orang	0	APBD		20 Orang	0
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Penunjang Kegiatan Pengawasan		100 %	1.250.600.000			100 %	1.320.600.000
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	11 Paket	40.000.000	APBD		11 Paket	50.000.000
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	60 Paket	170.000.000	APBD		60 Paket	200.000.000
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	1500 Paket	230.000.000	APBD		1500 Paket	250.000.000
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kabupaten Bengkulu	20 Paket	120.000.000	APBD		20 Paket	140.000.000
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kabupaten Bengkulu	20 Dokumen	10.000.000	APBD		20 Dokumen	0
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bengkulu	170 Laporan	630.000.000	APBD		170 Laporan	630.000.000
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Bengkulu	1 Dokumen	50.600.000	APBD		1 Dokumen	50.600.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Penunjang Kegiatan Pengawasan		100 %	25.000.000			100 %	
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di sediakan	Kabupaten Bengkulu	2 Unit	0	APBD		2 Unit	0
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kabupaten Bengkulu	1 Unit	0	APBD		3 Unit	0
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	5 Unit	10.000.000	APBD		10 Unit	0
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	15 Unit	15.000.000	APBD		15 Unit	0
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Kegiatan Pengawasan		100 %	329.318.080			100 %	329.318.080
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bengkulu	5 Laporan	99.000.000	APBD		5 Laporan	99.000.000
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	3 Laporan	190.000.000	APBD		3 Laporan	190.000.000
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	2 Laporan	40.138.080	APBD		2 Laporan	40.138.080
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan Pengawasan		100 %	340.000.000			100 %	340.000.000
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Bengkulu	13 Unit	340.000.000	APBD		13 Unit	340.000.000
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Bengkulu	1 Unit	546.000.000	APBD		1 Unit	546.000.000
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Bengkulu	20 Unit	65.000.000	APBD		20 Unit	65.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		100 %	1.281.250.000			100 %	1.261.250.000
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK		80 %	1.061.250.000			80 %	1.041.250.000
		Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP		95 %				95 %	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Bengkalis	25 Laporan	311.250.000	APBD		25 Laporan	311.250.000
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Bengkalis	25 Laporan	180.000.000	APBD		25 Laporan	180.000.000
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	20.000.000	APBD		1 Laporan	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kabupaten Bengkalis	11 Laporan	200.000.000	APBD		11 Laporan	200.000.000
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kabupaten Bengkalis	5 Kesepakatan	150.000.000	APBD		5 Kesepakatan	150.000.000
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Bengkalis	2 Dokumen	200.000.000	APBD		2 Dokumen	200.000.000
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat		100 %	220.000.000			100%	220.000.000
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kendala Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kabupaten Bengkalis	1 Laporan	0	APBD		1 Laporan	0
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Bengkalis	10 Laporan	220.000.000	APBD		10 Laporan	220.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Tindak Lanjut Hasil Asistensi		100 %	454.190.975			100 %	454.190.975
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Level Maturlas SPIP		Level 3	454.190.975			Level 3	454.190.975
		Persentase Capaian MCP Korusupah Koruspi		90 %				90 %	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Unsur Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Unsur Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bengkalis	46 Perangkat Daerah	259.190.975	APBD		46 Perangkat Daerah	259.190.975
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bengkalis	10 Perangkat Daerah	25.000.000	APBD		10 Perangkat Daerah	20.000.000
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Koruspi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Koruspi	Kabupaten Bengkalis	4 Kegiatan	130.000.000	APBD		4 Kegiatan	130.000.000
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Bengkalis	46 Perangkat Daerah	40.000.000	APBD		46 Perangkat Daerah	45.000.000
	JUMLAH				14.478.209.154				14.478.209.154

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dan Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2026. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2026.

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang Pengawasan yang tertuang dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kualitas Pengawasan Internal
2. Perlu optimalisasi pengawasan sistem integritas kinerja Pemerintah Daerah.
3. Perlu peningkatan kompetensi dan kelembagaan APIP.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja. Renja Kerja Inspektorat Daerah memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Bengkalis, Juni 2025

 **INSPEKTUR DAERAH,**

H. RADIUS AKIMA, S.Sos, M.T
PEMBINA UTAMA MUDA
NP. 19710522 199101 1 001